KAJIAN BANDARA EMBARKASI HAJI DI INDONESIA

Oleh : **Drs. M.N. Nurrasjid *)**

ABSTRAKSI

Transportasi merupakan alat yang penting dan strategis untuk memperlancar roda pemerintahan dan perekonomian serta negara sekaligus untuk mempererat hubungan antar bangsa. Perkembangan transportasi tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi, sosial, politik dan hankam serta pengaruh global. Adalah tugas pemerintah untuk mempersiapkan alat transportasi bagi umat islam yang akan melaksanakan ibadah haji. Baik mempersiapkan sarananya maupun prasarananya sesuai dengan jumlah jamaah haji yang akan dilayani.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, ditetapkanlah oleh pemerintah 27 bandara di Indonesia sebagai bandara internasional. Dari 27 bandara internasional tersebut melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 2004 dan KM 67 Tahun 2004 tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji, Pemerintah menetapkan bandara embarkasi dan debarkasi haji sebanyak 11 bandara.

Pemerintah Indonesia harus menyiapkan bandara embarkasi haji yang mampu di darati pesawat terbang dengan kapasitas > 400 penumpang (wide body) dan memberangkatkan Jamaah haji sebanyak 7000 Jamaah haji.

Kata kunci : Jamaah Haji, Bandara Embarkasi dan Debarkasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan alat yang sangat penting dan strategis untuk memperlancar roda pemerintahan dan perekonomian suatu Negara sekaligus untuk mempererat hubungan antar bangsa. Selain dari itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Transportasi akan berkembang tidak dapat terlepas dari perkembangan Ekonomi, Sosial dan Politik, Hankam serta pengaruh global. Indonesia yang wilayahnya terdiri dari kepulauan, menyebabkan transportasi udara sangat berperan sebagai penghubung antar pulau sekaligus sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam mengantisipasi pertumbuhan ekonomi Indonesia , bandar udara (bandara) sebagai simpul dari jaringan prasarana transportasi udara harus ditata dengan baik sesuai dengan perkembangan tersebut. Untuk menata perkembangan bandara di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional ditetapkanlah dasar untuk perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan pengoperasian bandara-bandara di Indonesia baik untuk bandara umum maupun bandara khusus.

Karena penerbangan haji merupakan penerbangan internasional, sedangkan Indonesia termasuk negara yang terbanyak jamaah hajinya, maka dalam mengantisipasi perkembangan penerbangan dimasa datang perlu dilakukan kajian yang mengevaluasi terhadap bandara-bandara embarkasi haji dan bandara yang berpotensi sebagai bandara embarkasi haji.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kajian ini adalah untuk mengevaluasi bandara-bandara embarkasi haji dan mengetahui bandara-bandara yang berpotensi menjadi bandara embarkasi haji.

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pimpinan dalam mengambil kebijakan penetapan bandara embarkasi haji

C. Ruang Lingkup Kajian

Sesuai dengan maksud kajian , maka ruang lingkup kajian meliputi :

1. Menginventarisasi bandara-bandara yang sudah bersifat bandara Internasional
2. Menginventarisasi daerah-daerah yang berpotensi jamaah haji
3. Mengidentifikasi bandara - bandara dan daerah yang kemungkinan dapat dikembangkan menjadi bandara embarkasi
4. Rekomendasi

D. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa bandara embarkasi haji saat ini keberadaannya belum sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah

E. Hasil Yang Diharapkan

Bandara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bandara embarkasi haji merupakan bandara yang strategis untuk meningkatkan pelayanan jamaah haji sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan

METODOLOGI

A. Pendekatan yang digunakan

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari kajian, maka untuk melakukan analisisnya dengan mengevaluasi terhadap prasarana dan fasilitas yang ada di bandara-bandara embarkasi haji dan bandara Internasional yang kemungkinan bisa dijadikan embarkasi haji dan potensi jamaah haji yang terdapat dimasing-masing daerah.

B. Pola Pikir Kajian

Pola pikir yang dibuat merupakan kerangka pikir dalam memahami keseluruhan kegiatan dari mulai input-output dan proses data outcome yang terlihat pada gambar 1.

- Pada pola pikir kajian tersebut, sebagai input atau masukan adalah kondisi bandara embarkasi dan fasilitasnya saat ini
- Sebagai subjeknya adalah instansi yang terkait yaitu Dephub/Ditjen Hubud, Departemen Agama/Ditjen Urusan Haji dan Pemerintah Daerah
- Sebagai objeknya adalah prasarana dan fasilitas dibandara embarkasi haji
- Metode yang digunakan dalam kajian ini evaluasi terhadap kondisi bahwa bandara embarkasi haji dan bandara-bandara yang berpotensi sebagai embarkasi haji
- Sebagai instrumental input adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan embarkasi haji
- Sebagai enviromental input adalah kondisi external yang mempengaruhi penetapan bandara embarkasi haji
- Output dari kajian adalah rekomendasi sebagai bahan penetapan bandara embarkasi haji
- Outcomenya adalah terciptanya peningkatan pelayanan jamaah haji di bandara-bandara embarkasi haji di Indonesia

Gambar 1.
Pola Pikir Kajian

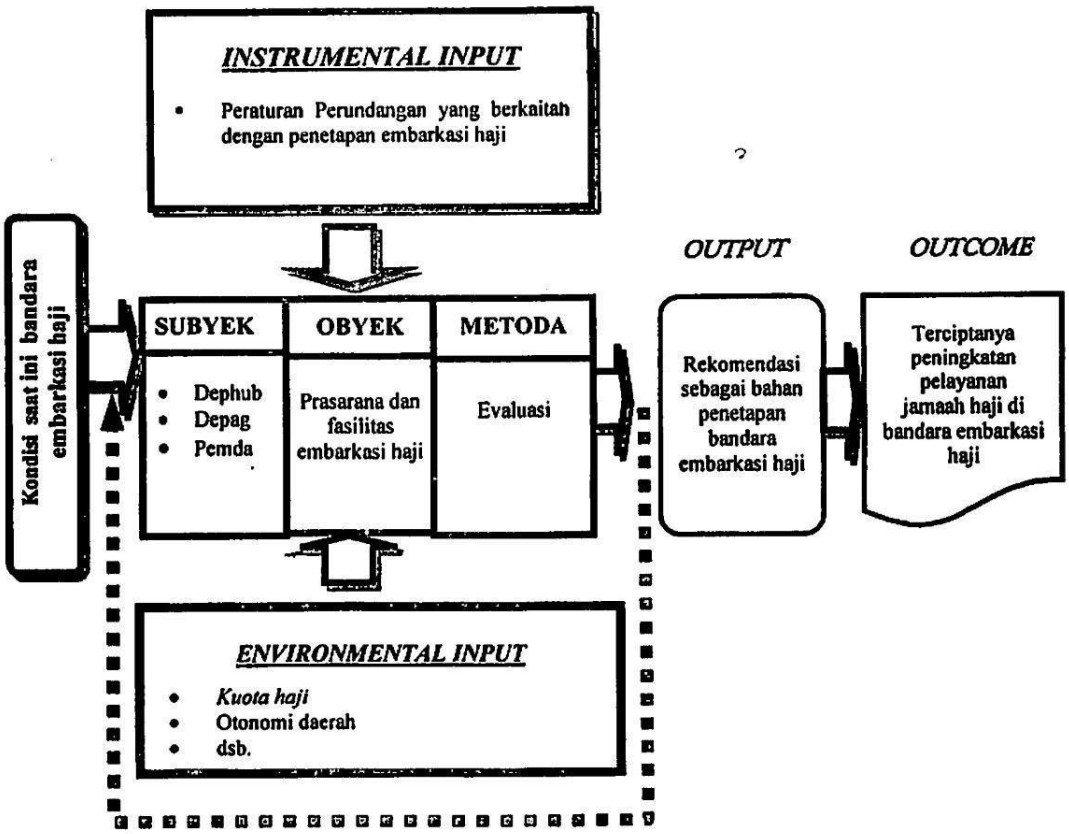

C. Pengumpulan dan pengolahan Data

Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan para petugas di Departemen Perhubungan, Departemen Agama dan Pemda sedangkan data skunder diperoleh dari laporan dan kepustakaan. Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah melalui tabulasi data, selanjutnya digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis.

GAMBARAN UMUM

A. Bandara Embarkasi/Debarkasi Haji

Bandara yang sudah berstatus bandara Internasional di Indonesia berjumlah 27 bandara, akan tetapi yang ditetapkan sebagai bandara embarkasi haji pada tahun 2007 berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 383 Tahun 2004 atau KM 67 Tahun 2004 tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji, ditetapkan 11 bandara embarkasi dan debarkasi haji yaitu :

1. Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh (BTJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

2. Bandara Polonia Medan (MES) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara
3. Bandara Minangkabau Internasional Airport Padang (PDG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu dan sebagian provinsi Jambi meliputi Kab. Maringan, Kab. Kerinci, Kab. Soro Langun, Kab Blango dan Kab. Tebo
4. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung
5. Bandara Hang Nadim Batam (BTH) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat, dan sebagian provinsi Jambi meliputi Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muro Jambi, Kota jambi, dan Kab. Baranghari
6. Bandara Soekarno-Hatta Jakarta (JKT) sebga Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Lampung
7. Bandara Adi Sumarmo Solo (SOC) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I Jogyakarta dan sebagaian provinsi Kalimantan Tengah meliputi Kota. Waringin Barat, Kab. Lamandan, dan Kab. Sukamara
8. Bandara Juanda Surabaya (SUB) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur..
9. Bandara Sepinggan Balikpapan (BPN) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Timor dan Provinsi Sulawesi Tengah
10. Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin (BDJ) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dan sebagian Provinsi Jambi Kalimantan Tengah meliputi Kota Palangkaraya, Kab. Kapuas, Kab. Baritocerata, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Seruyan, Kab Karingon, Kab. Pulang Pisan, Kab. Gunung Mas, Kab. Barito timur dan Kab. Murung Raya
11. Bandara Hasanuddin Makasar (UPG) sebagai Embarkasi dan Debarkasi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat

B. Kuota Jamaah Haji

1. Penetapan Kuota Jamaah haji

Berdasarkan Keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) di Amman tahun 1987 ditetapkan kuota jamaah haji untuk masing-masing negara anggota termasuk Indonesia yaitu 1 per mil dari jumlah penduduk suatu negara. Dari ketetapan secara Internasional tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah Indonesia setiap tahun disesuaikan dengan jumlah penduduknya dan selanjutnya penetapan itu digunakan sebagai patokan untuk jumlah porsi jamaah haji dimasing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Pemerintah Arab Saudi sebagai negara yang akan menjadi tuan rumah bagi jemaah haji seluruh dunia menetapkan bahwa porsi jamaah haji bagi Indonesia yaitu 205.000 jamaah tidak termasuk petugas haji. Sehingga pada musim haji 1427 H/2006 M pemerintah menetapkan porsi jamaah haji untuk masing-masing provinsi berdasarkan 1 permil dari jumlah penduduk muslimnya melalui Keputusan Menteri Agama

Nomor 31 tahun 2007 tentang Penetapan Porsi Jamaah Haji Indonesia tahun 1428 H/2007 M dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Jumlah porsi jamaah haji Indonesia tahun 2007

No	Provinsi	Jumlah Porsi	Petugas Daerah	Persen %
1.	Nangroe Aceh Darussalam	3.558	33	1,73
2.	Sumatera Utara	8.050	53	4
3.	Sumatera Barat	4.347	40	2,12
4.	Riau	4.995	33	2,43
5.	Jambi	2.606	20	1,27
6.	Sumatera Selatan	6.290	58	3,06
7.	Bengkulu	1.596	15	0,77
8.	Lampung	6.216	41	3,03
9.	Bangka Belitung	904	9	0,44
10.	Kepulauan Riau	982	7	0,47
11.	DKI Jakarta	7.012	46	3,42
12.	Jawa Barat	37.227	248	18,15
13.	Jawa Tengah	29.363	2118	14,32
14.	D.I Yogyakarta	3.059	23	1,49
15.	Jawa Timur	33.810	225	16,49
16.	Banten	8.451	56	4,12
17.	Bali	207	1	0,10
18.	Nusa Tenggara Barat	4.446	30	2,16
19.	Nusa Tenggara Timur	417	3	,.20
20.	Kalimantan Barat	2.314	15	1,12
21.	Kalimantan Tengah	1.335	12	0,65
22.	Kalimantan Selatan	3.461	32	1,68
23.	Kalimantan Timur	2.790	26	1,36
24.	Sulawesi Utara	627	6	0,30
25.	Sulawesi Tengah	1.740	16	0,84
26.	Sulawesi Selatan	6.826	63	3,32
27.	Sulawesi Tenggara	1.660	15	0,80
28.	Gorontalo	881	8	0,42
29.	Sulawesi Barat	1.428	13	0,69
30.	Maluku	608	6	0,29
31.	Maluku Utara	972	9	0,47
32.	Papua	533	5	0,26
33.	Irian Jaya Barat	289	3	0,14
34.	Jamaah Haji Khusus	16.000	-	7,80
	Jumlah	205.000	1.388	100

Sumber : Dep. Agama 2007

Tabel 1. menunjukkan bahwa jumlah porsi tiap-tiap provinsi dibandingkan secara nasional adalah : Namgroe aceh Darussalam 1,73 %, Sumatera Utara 4 %, Sumatera Barat 2,12 %, Riau 2,43 %, jambi 1,27 %, Sumatera Selatan 3,06 %, Bengkulu 0,77 %, Lampung 3,03 %, Bangka Belitung 0,44 %, Kep. Riau 0,47 %, DKI Jakarta 3,42%, Jawa Barat 18,15 %, Jawa Tengah 14,32 %, D.I Yogyakarta 1,49 %, Jawa Timur 16,49 %, Banten 4,12 %, Bali 0,10 %, Nusa Tenggara barat 2,16 %, Nusa Tenggara Timur 0,20 %, Kalimantan Barat 1,12 %, Kalimantan Tengah 0,65 %, Kalimantan Selatan 1,68 %, Kalimantan Timur 1,36 %, Sulawesi Utara 0,30 %, Sulawesi Tengah 0,84 %, Sulawesi Selatan 3,32 %, Sulawesi Tenggara 0,80 %, Gorontalo 0,42 %, Sulawesi Barat 0.69 %, Maluku 0,29 %, Maluku Utara 0,47 %, Papua 0,26 %, Irian Jaya Barat 0,14 % dan jamaah haji khusus 7,80 %.

2. Jumlah Jamaah haji Indonesia

Penduduk muslim Indonesia yang mendaftarkan untuk berangkat haji tiap tahunnya terus meningkat, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sosial, budaya, ekonomi dan pemahaman terhadap agama, sehingga komposisi jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci disesuaikan dengan porsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti terlihat pada tabel 2.

Tabel 2

Jumlah Jamaah haji Indonesia yang Berangkat Per Provinsi Tahun 2002 – 2007

No.	Provinsi	Tahun					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	5.731	4.973	5.906	5.141	4.651	3.525
2.	Sumatera Utara	7.801	7.077	7.936	7.460	7.595	7.997
3.	Sumatera Barat	4.313	4.310	4.649	4.567	4.403	4.307
4.	Riau	5.571	6.099	6.497	6.185	5.546	4.962
5.	Jambi	1.925	1.722	1.995	1.975	2.443	2.586
6.	Sumatera Selatan	3.920	3.489	3.995	4.035	6.188	6.232
7.	Bengkulu	420	362	510	717	1.019	1.581
8.	Lampung	2.328	2.095	2.733	2.735	4.555	6.175
9.	Bangka Belitung	-	363	536	811	882	895
10.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	975
11	DKI Jakarta	11.881	13.496	14.725	14.428	10.625	6.966
12.	Jawa Barat	30.802	22.092	24.125	24.119	29.767	36.979
13.	Jawa Tengah	20.688	18.229	19.772	19.648	24.827	29.145
14.	D.I Yogyakarta	2.297	2.234	2.553	2.596	2.894	3.036
15.	Jawa Timur	34.468	33.771	34.611	33.824	34.099	33.585
16.	Banten	-	4.354	5.215	5.106	7.426	8.395
17.	Bali	830	630	741	843	619	206
18.	Nusa Tenggara Barat	4.559	4.825	4.962	4.973	4.412	4.416
19.	Nusa Tenggara Timu	333	323	384	493	440	414
20.	Kalimantan Barat	1.266	1.245	1.500	1.505	2.246	2.299

No.	Provinsi	Tahun					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
21.	Kalimantan Tengah	1.884	1.449	1.903	1.991	1.682	1.923
22.	Kalimantan Selatan	6.360	6.719	7.225	6.702	4.918	3.429
23.	Kalimantan Timur	5.465	7.451	7.017	6.937	4.614	2.764
24.	Sulawesi Utara	931	552	599	627	627	621
25.	Sulawesi Tengah	1.920	2.172	2.263	2.283	2.016	1.724
26.	Sulawesi Selatan	19.612	21.983	22.267	21.455	13.903	6.763
27.	Sulawesi Tenggara	1.977	2.328	2.473	2.380	2.092	1.645
28.	Gorontalo	-	399	502	864	605	873
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	1.415
30.	Maluku	931	521	483	596	605	602
31.	Maluku Utara	-	731	731	832	739	963
32.	Papua	1.095	1.339	1.339	1.581	1.004	528
33.	Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-	286
34.	Petugas Kloter	2.398	2.372	2.513	2.372	1.409	1.388
35.	Petugas Non Kloter	356	346	314	32	598	-
36.	Jamaah Haji Khusus	14.751	21.327	11.941	15.587	13.959	16.000
	Jumlah	196.813	201.319	204.915	205.400	203.609	205.600
		-	+ 2,28 %	+ 1,78 %	+ 0,23 %	- 0,87 %	+ 0,97 %

Sumber : Dep. Agama (2007)

Dari tabel .2. dapat diketahui bahwa jumlah jamaah haji ditambah petugas kloter, non kloter dan jamaah haji khusus pada tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 2,28 % dibanding tahun 2002, tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 1,78 % dibanding tahun 2003, tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 0,23 % dibanding tahun 2004, tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 0,87 % dibanding tahun 2005 sedangkan tahun 2007 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,97 % dibanding tahun 2006

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Angkutan Haji

Sudah sejak zaman penjajahan Belanda penduduk muslim Indonesia menunaikan ibadah haji ke Tanah suci Mekkah. Saat itu perjalanan yang ditempuh memerlukan waktu cukup lama karena menggunakan kapal laut. Sejak Indonesia merdeka kebijakan angkutan haji dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia masih menggunakan kapal laut dengan melibatkan pihak swasta dalam penyediaan alat angkutan. Dengan berkembangnya teknologi transportasi, maka pemerintah mulai mengangkut jamaah haji menggunakan pesawat udara dengan melibatkan perusahaan penerbangan swasta.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan haji kepada penduduk muslim di Indonesia, maka saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang angkutan haji sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Departemen Agama bertindak sebagai koordinator dan pengawas pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Departemen Agama menetapkan perusahaan penerbangan dan spesifikasi pesawat udara yang akan mengangkut jamaah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi atau sebaliknya melalui tender terbuka
3. Departemen Perhubungan mengevaluasi kelaikan pesawat udara yang telah ditetapkan untuk mengangkut jamaah haji

4. Pelaksanan kegiatan penerbangan haji adalah penebangan charter yang wajib memiliki persetujuan terbang (flight approvee) dari Departemen Perhubungan.

Untuk keperluan angkutan udara bagi jamaah haji di tanah air ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut :

1. Angkutan jamaah haji dari daerah asal ke embarkasi haji atau seballiknya dapat dilakukan oleh perusahaan penerbangan niaga berjadwal atau charter
2. Biaya angkutan udara dari daerah asal ke embarkasi atau sebaliknya adalah berdasarkan tarif angkutan udara domestik yang berlaku dan apabila merupakan penerbangan charter berdasarkan atas kesepakatan para pihak.
3. Perusahaan penerbangan dan pengelola bandara wajib memberikan kemudahan serta fasilitas yang diperlukan terhadap para calon jamaah haji

Pada musim haji tahun 1429 H/2008M, Pemerintah menetapkan 2 (dua) perusahaan penerbangan untuk mengangkut jamaah haji Indonesia yaitu perusahaan penerbangan Garuda akan menyediakan 14 pesawat berbadan lebar masing-masing 4 (empat) B-747, 7 (tujuh) B-767 dan 3 (tiga) A-330 yang akan mengangkut jamaah haji sebanyak 107.465 jamaah, tergabung dalam 302 kloter dari 9 (sembilan) embarkasi meliputi Banda Aceh 3.669 jamaah (14 kloter), Padang 7.247 jamaah (27 kloter), Palembang 7.418 jamaah (28 kloter), Jakarta 22.152 jamaah (49 kloter), Solo 33.384 jamaah (82 kloter), Surabaya 10.021 jamaah (22 kloter). Banjarmasin 4.709 jamaah (17 kloter), Balikpapan 5.306 jamaah (9 kloter) dan Makasar 13.559 jamaah (42 kloter). Sedangkan perusahaan penerbangan Saudia Airlines akan mengangkut sebanyak 86.000 jamaah haji meliputi embarkasi Batam, Surabaya dan Medan. (Suara Karya, 15 Oktober 2008).

Perusahaan penerbangan yang melayani angkutan haji sari Indonesia ke Arab Saudi harus memiliki landing permit dari Presidency of Civil Aviation Kingdom Saudi Arabia dan "Hajj Control" untuk mendapatkan arrival times dan departure times (slot time) di Bandara King Abdul Aziz – Jeddah

B. Kebutuhan Bandara Embarkasi dan Debarkasi Haji

Penetapan bandara embarkasi dan debarkasi haji tidak terlepas dari jumlah jamaah haji yang harus diangkut sehingga tidak semua bandara yang ada walaupun sudah berstatus bandara Internasional dapat dijadikan embarkasi haji. Berdasarkan Km. 44 Tahun 2002 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Pemerintah menetapkan 27 bandara di Indonesia sebagai bandara Internasional seperti pada tabel 3.

Tabel 3
Bandara Internasional

NO	NAMA BANDAR UDARA	KAPASITAS	PENGELOLA
1.	ADI SUMARMO / SOLO	MD-11	PT. AP I
2.	AHMAD YANI / SEMARANG	B-737	PT. AP I
3.	ADI SUTJIPTO / YOGYAKARTA	B-737	PT. AP I
4.	JUANDA / SURABAYA	B-747	PT. AP I
5.	NGUARAH RAI / DENPASAR	B-747	PT. AP I
6.	SAM RATULANGI / MANADO	A-300	PT. AP I
7.	HASANUDDIN / MAKASAR	B-747	PT. AP I
8.	SELAPARANG / MATARAM	B-737	PT. AP I

NO	NAMA BANDAR UDARA	KAPASITAS	PENGELOLA
9.	ELTARI / KUPANG	A-330	PT. AP I
10.	SEPINGGAN / BALIKPAPAN	B-747	PT. AP I
11.	FRANS KAISIEPO / BIAK	B-737	PT. AP I
12.	PATIMURA / AMBON	MD-11	PT. AP I
13.	SYAMSUDDIN NOOR / BANJARMASIN	B-747	PT. AP I
14.	POLONIA / MEDAN	A-330	PT. AP II
15.	MINANGKABAU / PADANG	B-737	PT. AP II
16.	ST. SYARIF KASIM II / PEKAN BARU	MD-11	PT. AP II
17.	SM. BADARUDDIN II / PALEMBANG	B-747	PT. AP II
18.	SOEKARNO HATTA / JAKARTA	B-737	PT. AP II
19.	HUSEIN SASTRANEGARA / BANDUNG	B-737	PT. AP II
20.	SUPADIO / PONTIANAK	MD-1	PT. AP II
21.	ST. ISKANDARMUDA / BANDA ACEH	F-28	PT. AP II
22.	KIJANG / TANJUNG PINANG	B-747	PT. AP II
23.	HALIM PERDANA KUSUMA / JAKARTA	B-737	PT. AP II
24.	JUWATA / TARAKAN	B-737	DEPHUB
25.	SENTANI / JAYAPURA	B-737	DEPHUB
26.	MOPAH / MERAUKE	B-747	DEPHUB
27.	HANG NADIM / BATAM		OTORITA

Sumber : Ditjen Perhubungan Udara

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bandara untuk menjadi bandara embarkasi dan debarkasi haji sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Repubilik Indonesia Nomor 383 Tahun 2004 atau KM. 67 Tahun 2004 tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji adalah :

1. Status bandara Internasional dalam arti terbuka untuk melayani angkutan udara ke dan dari luar negeri, mempunyai fasilitas sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku diantaranya harus ada imigrasi, bea cukai dan
2. Jumlah calon jamaah haji sekurang-kurangnya 7.000 orang dengan fasilitas asrama haji yang dapat menampung sekurang-kurangnya 1.200 orang dilengkapi dengan perlengkapan untuk jamaah haji bermalam.
3. Teknis operasional penyelenggaraan haji yang efektif dan efesien dalam hal adanya kesepakatan penyelenggaraan angkutan haji antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi mengenai alokasi waktu (slot time) penerbangn dan jenis pesawat udara yang ada dioperasikan

Untuk menunjang keberhasilan dari tujuan ditetapkannya peraturan perundangan dengan beberapa persyaratan tersebut maka perlu ditetapkan bandara-bandara Internasional yang ada 27 (dua puluh tujuh) sebagai bandara embarkasi dan debarkasi haji. Tahun 2007 pemerintah menetapkan 11 (sebelas) bandara embarkasi dan debarkasi haji yaitu :

1. Bandara Soekarno-Hatta

Runway

Bandara Soekarno-Hatta yang terletak 20 km sebalah barat kota Jakarta ini merupakan bandara internasional. Dengan luas bandara 1.80 Ha, bandara dengan konstruksi cakar ayam ini memiliki 2 (dua) runway sejajar dengan jarak 2.400 m yang di hubungkan dengan persilangan taxiway. Bandara ini berdimensi 3.660 m x 60 m untuk sebelah selatan dan berdimensi 3.600 m x 60 m untuk sebelah utara. Runway ini

dikategorikan runway bebas yang dapat dioperasikan secara berulang-ulang mampu didarati oleh pesawat sejenis B-747 dengan kapasitas 74 pesawat terbang/jam

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini untuk A, B, C, dan alat kontrol adalah 266.326 m2 sdangkan untuk D, E, F dan alat kontrol adalah 472.853 m2.

Kapasitas bandara ini adalah :

1. Terminal A 7B-747
2. Terminal B 7A-300
3. Terminal C 16F-28 / DC-9
4. Terminal D 8 B-747
5. Terminal E 8 B-747
6. Terminal F 8 B-747

Posisi letak pengendali :

1. Terminal I 8 F-28
2. Terminal II 8 B-747
3. Cargo Apron 4 B-747
4. Next Stop 13 DC-9

Fasilitas bandara di dukung dengan beberapa pengendali lalu lintas, fasilitas telekomunikasi penerbangan, fasilitas pengobatan dan pelayanan informasi cuaca. Didukung juga oleh beberapa pelayanan bandara seperti, bagasi yang terpisah, car call, ruang perawatan gratis, informasi kehilangan untuk kedatangan dan keberangkatan, layanan kuli panggul.

Sistem komputerisasi bandara di dukung oleh beberapa elemen seperti RADAR Data Processing System (RDPS), Flight Data Processing System (FDPS), Automatic Massage Switching Centre (AMSC), dan Remote Control and Signalling System (RCSS) yang digunakan untuk :

- Radio System (RAD)
- Electric Supply and Distribution System (ELE)
- Flight Information Dispaly System (FIDS)
- Centralized Information System (CIS)
- AutoMaticMulti Acces Chek-In System (AMACS)
- Integreted Immigration Information System (!13S)
- Jakarta Automated Air, Traffic Control System
- Aedodrome Data Processing System

Terminal

Terdapat 2 (dua) terminal di Bandara Soekarno-Hatta terminal I melayani penerbangan dalam negeri di sub A,B,C dan terminal II melayani penerbangan internasional dan dalam Negeri di sub D,E dan F. Luas keseluruhan area terminal I dan II adalah 276.308 m2 dengan kapasitas 9.000.000 pax pertahun

Rute penerbangan terminal antara lain :

Pada Terminal I :

A : -
B : Penerbangan Merpati untuk skala domestik
C : Penerbangan lain untuk skala domestik

Pada Terminal II :

D : Penerbangan internasional kecuali Garuda
E : Penerbangan Garuda untuk internasional
F : Penerbangan Garuda untuk skala domestik
Sub Terminal D : Internasional
Sub Terminal E : Internasional
Sub Terminal F : Domestik

Fasilitas-fasilitas Terminal :

- Gang/papa lintas teleskopis terminal I : 21 satuan, dan terminal II : 44 satuan
- Terminal I sabuk konveyor : 36 satuan, dan terminal II : 27 satuan
- Meja kasir masuk penginapan I terminal : 39 satuan dan terminal II : 96 satuan
- Gudang entreport daerah : 12710 m2
- Daerah domestik : 15421 m2
- Kategori pasukan pemadam kebakaran IX
- Darurat ilmu penerbangan medis
- Hidrant fuelling sistim
- Terminal kargo
- Dapur penerbangan
- Jasa penanganan bumi
- Tempat umum seperti, jasa telekomunikasi, kafe, toko, swalayan, jasa persewaan mobil, jawatan penerangan wisatawan, jasa sambutan wisatawan, bank, toko roti dan Informasi layanan penumpang
- Jasa medis untuk penumpang penderita sakit, ada satu pusat medis di seberang kantor-kantor Angkasa Pura II pada gedung administrasi tersedia pula beberapa fasilitas seperti ambulance darurat.
- DAMRI bus bolak balik

Jasa menurut ilmu penerbangan

- Kendali lalu lintas udara
- Fasilitas-fasilitas komunikasi menurut ilmu penerbangan
- Fasilitas-fasilitas penerbangan
- Fasilitas-fasilitas alat peraga visual
- Jasa tentang cuaca
- Pelayanan bagasi ditinggalkan (Terminal D)
- Pemanggil Pengemudi, tarif IDR 1,000,000 / orang
- Kebun bibit tinggal (penerusan tinggal Terminal D), gratis
- Layanan kuli pengangkut barang, untuk masuk dan penumpang
- Layanan lost and found (setiap terminal)

2. Bandara Juanda Surabaya

Runway

Bandara Juanda yang terletak 20 Km dari kota Surabaya ini merupakan bandara Internasional. Dengan luas bandara 680 Ha, bandara ini memiliki klasifikasi kelas IA dengan arah landasan 10-28 dan berdimensi 3.000 x 45 m2, elevasi 9 feet dan kode

ICAO/IATA adalah WARR/SUB bandara ini beroperasi selama 8 jam (06.00 – 24.00 WIB / 23.00 – 17.00 UTC), mampu didarati oleh pesawat sejenis B-747

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini adalah 148.000 m2 dengan kapasitas apron :

1. Type wide big body adalah pesawat B-747,
2. Type wide body adalah pesawat A-300 / DC-10 / MD-11
3. Type narrow body adalah pesawat B-737 / F-100,

Dengan jumlah posisi parking stand pada alternative ke-2 sebesar 18

Terminal

Untuk terminal penumpang luas terminal skala internasional adalah sebesar 23.000 m2 dengan kapasitas 3 juta pax pertahun. Sedangkan untuk terminal penumpang domestik, luasnya adalah 27.200 m2 dengan kapasitas 4 juta pax pertahun. Dan untuk terminal kargo luasnya sebesar 9.968 m2.

Telekomunikasi penerbangan didukung oleh beberapa elemen seperti HF/VHF,HF SSB, VHF-ER, VSAT,VHF ADC, VHF APP, VHF GROUND CINTROL, AMSC, VCSS, recording system dan radio VHF porrtable sejumlah 5 unit

Fasilitas

Dengan power supplay dari PLN sebanyak 5.540 KVA dan genset sebesar 2.431 KVH bandara ini mampu memenuhi kebutuhan beberapa elemen peralatan mekanikal seperti timbangan, conveyor, gravity roller, garbarata, travelator, escalator, elevator, dan AC. Dan beberapa peralatan elektikal seperti titik lampu : approach light, runway light, PAPI, REILS, SQFL, taxiway light, apron flood light dan apron edge light.

Fasilitas pengamanan didukung oleh x-ray, walk trough, explosive detector, handy metal detector, security CCTV.

Fasilitas PKP-PK tersedia CAT-VIII dengan jumlah armada 8 unit dan konfigurasi foam tender 5 Unit. Untuk fasilitas CIQ tersedia bea cukai, imigrasi, dan karantina berupa kesehatan hewan, tumbuhan dan ikan. Disediakan juga pelayanan umum berupa Informasi bank, telepon, restoran & kafetaria, wafing gallery, toko suvenir dan fasilitas penunjang seperti gedung EMPU, terminal TKI, dan gedung VIP. Dengan kapasitas parkir seluas 53.600 m2 mampu menampung 2.000 sedan dan sejenisnya. Akses ke bandara dapat juga dijangkau dengan bus DAMRI dan taxi.

3. Bandara Polonia Medan

Spesifikasi Bandara Polonia

Runway

Bandara Polonia yang terletak 1 Km dari kota medan ini merupakan bandara internasional. Dengan luas bandara 144 Ha, dengan arah landasan berdimensi 2,900 x 45 m mampu didarati oleh pesawat sejenis B-747

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini adalah 54.300 m2 dengan kapasitas apron :

1. 2 B-747 dan 1 A-300
2. 2 A-300, 2 B-737 dan 1 F-28
3. D 18 C-212

Terminal

Fasilitas-fasilitas terminal antara lain :

- Terminal kedatangan internasional
- Terminal keberangkatan internasional
- Terminal VIP (tamu-tamu penting)
- Terminal domestik
- Koridor terminal internasional
- Fasilitas gudang
- Kargo I gudang
- Kargo II gudang
- Gudang bahan
- Gudang wilpen
- Gudang peralatan dan MOI
- C.I.Q
- Fasilitas Kantor-kantor
- PT.AP Ops bangunan kantor
- PT.AP Ops bangunan kantor tambahan
- PT.AP bekas bangunan kantor Senopen
- Kantor PT.AP/DIVTUM & PRL
- Kantor PT.AP/Gd.EX.SARBAN
- Kantor Darma Wanita
- Fasiltas berbelanja
- Kafetaria
- Kafetaria karyawan
- Fasilitas penerbangan
- Kendali lalu lintas udara
- Fasilitas-fasilitas telekomunikasi menurut ilmu penerbangan
- Fasilitas-fasilitas penerbangan
- Jasa perkiraan cuaca
- Pasukan pemadam kebakaran, kategori VIII
- Ilmu penerbangan medis darurat
- Sistim gerak fueling
- Terminal kargo

4. Bandara Hasanuddin Makasar

Runway

Bandara Hasanuddin yang terletak 22 km dari kota Makasar ini merupakan bandara udara internasional. Dengan luas bandara 50,99 ha, bandara ini memiliki klasifikasi kelas IA dengan arah landasan 13 – 31 dan berdimensi 2.500 x 45 m2, elevasi 47 feet dan kode ICAO/IATA adalah WAAA/UPG bandara ini beroperasi selama 14 jam (07.00 – 21.00 WIB / 23.00 – 13.00 UTC), mampu didarati oleh pesawat sejenis B-747.

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini adalah 69.147 m2 dengan kapasitas apron :

1. Type wide big body adalah pesawat B-747,
2. Type wide body adalah pesawat A-300 / DC-10 / MD-11
3. Type narrow body adalah pesawat B-737 / F-100
4. Type lainnya adalah pesawat CN-212, MD-82, F-27 dan CN-235

Dengan jumlah posisi parking stand untuk alterenatif 1 sebesar 16 dan alternatif 2 sebesar 16 stand

Terminal

Untuk terminal penumpang, luasnya adalah 10.815 m2 dengan kapasitas 1,5 juta pax pertahun. Dan untuk terminal kargo luasnya sebesar 1.872 m2. Telekomunikasi penerbangan di dukung oleh beberapa elemen seperti HF/VHF, HF SSB, VHF-ER, VSAT, ADC, APP, ACC, MWARA, RDARA, AMSC, teleprinter, recording system, telex, faximile, radio link, SLJJ, UHF-radio komunikasi.

Dengan power supply dari PLN sebesar 4.451,5 KVA dan genset sebesar 3.241 KVH bandara ini mampu memenuhi kebutuhan beberapa elemen peralatan mekanikal seperti timbangan, conveyor, gravity roller, escalator, elevator, dan AC. Dan beberapa peralatan elektikal seperti titik lampu : approach light, runway light, PAPI, LIL, taxiway light, apron flood light.

Fasilitas pengamanan didukung oleh x-ray, walk trough, explosive detector, handy metal detector

Fasilitas PKP-PK tersedia CAT-VIII dengan jumlah armada 8 unit dan konfigurasi foam tender 5 Unit. Disediakan juga pelayanan umum berupa bank, telepon umum, kafetaria, dan pos. Akses ke bandara hanya dapat dijangkau dengan taxi bandara.

5. Bandara Sepinggan Balikpapan

Runway

Bandara Sepinggan Balikpapan yang terletak 13 Km dari kota Balikpapan ini merupakan bandara internasional. Dengan luas bandara 296 ha, bandara ini memiliki klasifikasi kelas IA dengan arah landasan 07 – 25 dan berdimensi 2.500 x 45 m2, elevasi 13 feet dan kode ICAO/IATA adalah WALL/BPN bandara ini beroperasi selama 12 jam (07.00 – 19.00 WITA / 23.00 – 11.00 UTC), bandara ini mampu didarati oleh pesawat sejenis A-300

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini adalah 106.543 m2 dengan kapasitas apron :

1. Type wide big body adalah pesawat B-747,
2. Type wide body adalah pesawat A-300 / DC-10 / MD-11
3. Type narrow body adalah pesawat B-737 / F-100
4. Type lainnya adalah pesawat Cassa B-707

Dengan jumlah posisi parking stand untuk alternatif 1 sebesar 21 dan alternatif 2 sebesar 13 stand.

Terminal

Untuk terminal penumpang luas keseluruhan adalah 12.274 m2, dengan luas terminal skala internasional adalah 2.032 m2 dengan kapasitas 60.000 pax pertahun. Sedangkan untuk terminal penumpang domestik, luasnya adalah 9.221 m2 dengan kapasitas 400.000 pax pertahun. Terminal kargo luasnya sebesar 4.885 m2, dan untuk check-in adalah 1.041 m2 (dioperasikan untuk penerbangan domestik dan internasional)

Telekomunikasi penerbangan di dukung oleh beberapa elemen seperti HF/VHF, HF SSB, VHF-ER, VSAT, ADC, APP, ACC, RDARA, AMSC, recording system.

Fasilitas

Dengan power supplay dari PLN sebanyak 3.465 KVA dan genset sebesar 4.393 KVH bandara ini mampu memenuhi kebutuhan beberapa elemen peralatan mekanikal seperti timbangan, conveyor, gravity roller, escalator, elevator, dan AC. Dan beberapa peralatan elektikal seperti titik lampu : approach light, runway light, PAPI, REILS, SQFL, taxiway light, rotating beacon, signal area dan apron flood light.

Fasilitas pengamanan didukung oleh x-ray, walk through, explosive detector, handy metal detector, security CCTV.

Fasilitas PKP-PK tersedia CAT-VII dengan jumlah armada 6 unit dan konfigurasi foam tender 4 Unit. Untuk fasilitas CIQ tersedia bea cukai, imigrasi, dan karantina berupa kesehatan, hewan, tumbuhan dan ikan. Disediakan juga pelayanan umum berupa Informasi bank, money changer, kantor pos, telepon umum, wartel, kafetaria, wafing gallery, dan fasilitas penunjang seperti Gedung EMPU dan Gedung VIP. Tersedia pula fasilitas parkir seluas 17.790 m2 dan pelataran GSE seluas 11.230 m2 Akses ke bandara hanya dapat dijangkau dengan taxi.

6. Bandara Adi Sumarmo

Runway

Bandara Adi Sumarmo yang terletak 11 km dari kota Solo ini merupakan bandara internasional. Dengan luas bandara 50,99 ha, bandara ini memiliki klasifikasi kelas IIA dengan arah landasan 08 – 26 dan berdimensi 2.600 x 45 m2, elevasi 948 feet dan kode ICAO/IATA adalah WARQ bandara ini beroperasi selama 11 jam (07.00 – 18.30 WIB / 23.00 – 11.00 UTC), bandara ini mampu didarati oleh pesawat sejenis MD-11

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini adalah 106.543 m2 dengan kapasitas apron :

1. Type wide big body adalah pesawat B-747,
2. Type wide body adalah pesawat A-300 / DC-10 / MD-11
3. Type narrow body adalah pesawat B-737 / F-100

Dengan jumlah posisi parking stand untuk alterenatif 1 sebesar 10

Terminal

Untuk terminal penumpang luas terminal skala internasional adalah 764 m2 dengan kapasitas 22.500 pax pertahun. Sedangkan untuk terminal penumpang domestik, luasnya adalah 1.428 m2 / DTO 2.052 m2 dengan kapasitas 78.500 pax pertahun. Dan untuk terminal kargo luasnya sebesar 768 m2

Telekomunikasi penerbangan di dukung oleh beberapa elemen seperti HF/VHF, HF SSB, VHF-ER, VSAT, ADC, AMSC, recording system, radio VHF portable 1 Unit

Fasilitas

Dengan power supplay dari PLN sebanyak 887 KVA dan genset sebesar 868 KVH bandara ini mampu memenuhi kebutuhan beberapa elemen peralatan mekanikal seperti timbangan, conveyor, gravity roller, dan AC. Dan beberapa peralatan elektikal seperti titik lampu : approach light, runway light, PAPI, REILS, SQFL, taxiway light, apron flood light.

Fasilitas pengamanan didikung oleh x-ray, walk through, explosive detector, handy metal detector

Fasilitas PKP-PK tersedia CAT-VII dengan jumlah armada 6 unit dan konfigurasi foam tender 3 Unit. Untuk fasilitas CIQ tersedia bea cukai (on request), imigrasi (on request), dan karantina berupa kesehatan, hewan, tumbuhan dan ikan. Disediakan juga pelayanan umum berupa bank, telepon, restaurant & kafetaria, dan fasilitas penunjang seperti gedung VIP. Disediakan juga fasilitas parkir dengan kapasitas parkir seluas 3.473 m2 dan pelataran GSE seluas 236 m2. Akses ke bandara hanya dapat dijangkau dengan taxi.

7. Bandara Iskandar Muda

Runway

Bandara Iskandar Muda yang terletak 5 Km dari pusat kota Banda Aceh ini merupakan bandara internasional. Dengan luas bandara 11.596 ha, dengan arah landasan berdimensi 2.250 x 45 m2, bandara ini mampu didarati oleh pesawat sejenis MD-11.

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini adalah 19,440 m2 dengan kapasitas apron : DC-9 / B-737

Terminal

Untuk terminal penumpang luas terminal skala internasional adalah 764 m2 dengan kapasitas 22.500 pax pertahun. Sedangkan untuk terminal penumpang domestik, luasnya adalah 1.428 m2/DTO 2.052 m2 dengan kapasitas 78.500 pax pertahun. Dan untuk terminal kargo luasnya sebesar 768 m2.

Telekomunikasi penerbangan didukung oleh beberapa elemen seperti HF/VHF, HF SSB, VHF-ER, VSAT, ADC, AMSC, recording system, radio VHF portable 1 unit.

Fasilitas

Fasilitas-fasilitas terminal antara lain :

- Terminal internasional
- Terminal domestik
- VIP (tamu-tamu penting)
- Kargo internasional
- Muatan dalam negeri
- Menara tua
- Menara baru
- Kantor-kantor Banops & Telnav
- Kantor-kantor Opstek
- Kantor-kantor Kacab & Admkom
- Bangunan PK-PPK
- Bangunan PH
- Bangunan Peralatan
- Bangunan bengkel
- Bangunan CCR
- Bangunan MSC

Fasilitas Penerbangan

- Kendali lalu lintas udara
- Fasilitas-fasilitas telekomunikasi menurut ilmu penerbangan
- Fasilitas-fasilitas penerbangan
- Fasilitas-fasilitas alat peraga visual
- Jasa perkiraan cuaca
- Pasukan pemadam kebakaran, kategori IX
- Ilmu penerbangan medis darurat
- Sistim gerak fueling

8. Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II

Runway

Bandara SM. Badaruddin II yang terletak 12 Km sebelah utara di barat kota Palembang ini merupakan bandara internasional. Dengan luas bandara 221 ha, dengan arah landasan berdimensi 2.200 x 45 m2, bandara ini mampu didarati oleh pesawat sejenis B-747.

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini adalah 17,651 m2 dengan kapasitas apron : 2 DC-92F-28, B 2 Hercules, IF-28,2 Pesawat terbang perang.

Terminal

Fasilitas-fasilitas terminal antara lain :

- Terminal
- Bangunan terminal penumpang
- Bangunan terminal kargo
- Opersai & bangunan administrasi
- Bangunan operasi
- Menara pengawas
- Bangunan keamanan
- Taman gerbong penumpang
- Taksi berdiri & kolam
- Pelataran parkir
- Bangunan PLN

Fasilitas Penerbangan

- Kendali lalu lintas udara
- Fasilitas-fasilitas telekomunikasi menurut ilmu penerbangan
- Fasilitas-fasilitas penerbangan
- Fasilitas-fasilitas alat peraga visual
- Jasa perkiraan cuaca
- Pasukan pemadam kebakaran, kategori VII
- Ilmu penerbangan medis darurat
- Sistim gerak fueling

9. Bandara Syamsuddin Noor

Runway

Bandara Syamsuddin Noor yang terletak 13 Km dari kota Banjarmasin ini merupakan bandara internasional. Dengan luas bandara 226 ha, bandara ini memiliki klasifikasi kelas IB dengan arah landasan 10 – 28 dan berdimensi 2.500 x 45 m2, elevasi 66 feet dan kode ICAO/IATA adalah WAOO / BDC bandara ini beroperasi selama 12 jam (07.00 – 19.00 WITA / 23.00 – 11.00 UTC), bandara ini mampu didarati oleh pesawat sejenis MD-11

Apron

Luas apron yang dimiliki bandara ini adalah 106.543 m2 dengan kapasitas apron :

1. Type wide big body adalah pesawat B-747,
2. Type wide body adalah pesawat A-300 / DC-10 / MD-11
3. Type narrow body adalah pesawat B-737 / F-100
4. Type lainnya adalah pesawat Cassa F-28

Dengan jumlah posisi parking stand untuk alternatif 1 sebesar 4 dan alternatif 2 sebesar 9 stand

Terminal

Untuk terminal penumpang luas terminal skala internasional adalah 5.175 m2 dengan kapasitas 740.000 pax pertahun. Dan untuk terminal kargo luasnya sebesar 802 m2

Telekomunikasi penerbangan di dukung oleh beberapa elemen seperti HF/VHF, HF SSB, VHF-ER, VSAT, ADC, RDARA, AMSC, recording system, HT, radio car dan radio base

Fasilitas

Dengan power supplay dari PLN sebanyak 555 KVA dan genset sebesar 815 KVH bandara ini mampu memenuhi kebutuhan beberapa elemen peralatan mekanikal seperti timbangan, conveyor, dan AC. Dan beberapa peralatan elektikal seperti titik lampu : approach light, runway light, PAPI, REILS, SQFL, taxiway light, apron flood light.

Fasilitas Pengamanan didukung oleh x-ray, walk through, explosive detector, handy metal detector.

Fasilitas PKP-PK tersedia CAT-VII dengan jumlah armada 6 unit dan konfigurasi foam tender 4 unit. Untuk fasilitas CIQ tersedia karantina berupa kesehatan, hewan, tumbuhan dan ikan. Disediakan juga pelayanan umum berupa bank, telepon, restaurant & kafetaria, dan wafing galery. Disediakan juga fasilitas parkir seluas 9.650 m2/DTO 6.657 m2 mampu menampung 241 sedan, bis dan sejenisnya. Akses ke bandara dapat juga dijangkau dengan angkutan dalam kota dan taxi.

10. Bandara Ketaping Minangkabau

Runway

Bandara Ketaping Minangkabau yang terletak 23 km dari kota Padang Pariaman ini merupakan bandara internasional. Dengan luas bandara 427 Ha, Bandara ini berdimensi 2.750 x 45 m2, bandara ini mampu didarati oleh pesawat sejenis A-300.

Apron

Luas Apron yang dimiliki bandara ini adalah 315 m X 120 m dengan kapasitas 8 stand B-737

Fasilitas

Fasilitas Bandara didukung dengan beberapa Pengendali Lalu Lintas, Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan, Fasilitas Pengobatan dan Pelayanan Informasi cuaca

11. Bandara Hang Nadim

Landasan pacu, panjang 4.025 m lebar 45 m
RESA (Runway and safety Area), Runway 04 (90 m x 300 m)
Runway 22 (180 m x 300 m)
Bandara ini mampu didarati oleh pesawat sejenis B-747

Taxiway

Parakel taxiway : 2.800 m x 23 m
Rapid exit taxiway (Band D) : 2 (300 m x 23 m)
Exit taxiway (A and C) : 2 (150 m x 23 m)

Apron

Luas : 110.54 m2
Kekuatan : PLN 79 F/X/C/T
Kapasitas : 7 wide body , 2 narrow body, 3 light aircraft
16 narrow body, 3 light aircraft (F-27 / F-28)

Terminal

Luas Internasional, domestic : 27.065 m2
Kapasitas penumpang / tahun : 3.300.000 penumpang
Dilengkapi dengan 4 Aviobridges
PK-PPK : Category IX (9)

Masing-masing bandara embarkasi tersebut oleh pemerintah ditetapkan daerah-daerah yang dilayaninya dengan porsi jamaah hajinya seperti terlihat table 4.

Tabel 4
Bandara embarkasi, Daerah yang dilayani dan Jumlah Porsi Jamaah haji

No	Embarkasi / Debarkasi	Daerah Layanan	Porsi Jamaah Haji	Jumlah Per Embarkasi
1.	Soekarno-Hatta (CGK)	DKI Jakarta	7.012	58.906
		Jawa Barat	37.227	
		Banten	8.451	
		Lampung	6.216	
2.	Juanda (SUB)	Jawa Timur	33.810	38.880
		Bali	207	
		NTB	4.446	
		NTT	417	
3.	Polonia (MES)	Sumatera Utara	8.050	8.050
4.	Hasauddin (UPG)	Sulawesi Selatan	6.826	13.824
		Sulawesi Barat	1.428	
		Sulawesi Tenggara	1.660	
		Sulawesi Utara	627	
		Gorontalo	881	
		Maluku	608	

No	Embarkasi / Debarkasi	Daerah Layanan	Porsi Jamaah Haji	Jumlah Per Embarkasi
		Maluku Utara	972	
		Papua	533	
		Irian Jaya Barat	289	
5.	Sepinggan (BPN)	Kalimantan Timur	2.790	4.530
		Sulawesi Tengah	1.740	
6.	Adi Sumarmo (SOC)	Jawa Tengah	29.363	32.756
		D.I Yogyakarta	3.059	
		Kalimantan Tengah	334	
		Kab. Kotawaringin Barat		
		Kab. Lamandau		
		Kab. Sukamara		
7.	Iskandar Muda (BTJ)	Nanggroe Aceh Darussalam	3.558	3.558
8.	Hang Nadim (BTH)	Riau	4.995	9.594
		Kepulauan Riau	982	
		Kalimantan Barat	2.314	
		Jambi :	1.303	
		Kab. Tanjung Jabung Barat		
		Kab. Tanjung Jabung Timur		
		Kota Jambi		
		Kab. Muro Jambi		
		Kab. Batang Hari		
9.	Syamsudin Noor (BOJ)	Kalimantan Selatan		
		Kalimantan tengah :	3.461	4.462
		Kota Palangkaraya	1.001	
		Kab. Kapuas		
		Kab Barito Utara		
		Kab. Kotawaringin Timur		
		Kab. Seruyan		
		Kab. Pulang Pisau		
		Kab. Gunung Mas		
		Kab. Barito Timur		
		Kab. Murung Raya		
10.	Minangkabau (PDG)	Sumatera Barat		
		Bengkulu	4.347	7.246
		Jambi :	1.596	
		Kab. Meringan	1.303	
		Kab. Soro langun		
		Kab. Bungo		
		Kab. Tebo		
11.	SM. Baharuddin II (PLM)	Sumatera Selatan	6.290	7.194
		Bangka Belitung	904	
	Jamaah Haji Khusus			16.000
	Jumlah			205.000

Sumber : Departemen Agama 2007

Tabel 4. menunjukkan bahwa sesuai dengan data porsi jamaah haji dan bandara-bandara embarkasi yang melayani daerah-daerah provinsi tersebut, bandara embarkasi yang jumlah jamaah hajinya terbanyak berturut-turut adalah Bandara Soekarno-Hatta (58.906 jamaah) urutan kedua bandara Juanda (38.880 jamaah) urutan ketiga Bandara Adi Sumarmo (32.756 jamaah) dan urutan keempat Bandara Hasanuddin (13.824 jamaah). Adapun selanjutnya adalah Bandara Hang Nadim (9.549 jamaah), Bandara Polonia (8.050 jamaah), Bandara Mingkabau (7.246 jamaah), Bandara SM. Badaruddin II (7.194 jamaah), Bandara Sepinggan (4.530 jamaah), Bandara Syamsuddin Noor (4.462 jamaah) dan Bandara Iskandar Muda (3.558 jamaah). Ketiga terakhir bandara embarkasi haji yang ada (Sepinggan, Syamsuddin Noor, Iskandar Muda) saat ini jumlah jamaah haji yang dilayaninya masih dibaah persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama yaitu 7.000 jamaah.

Melihat bandara-bandara embarkasi yang melayani jamaah haji terbanyak (table 4.). terdapat 2 (dua) bandara yang mempunyai jangkauan pelayanannya jauh yaitu Bandara Hasanudin (UPG) (melayani daerah Sulawesi Selatan sampai Papua) dan Bandara Juanda (SUB) (melayani daerah Jawa Timur sampai Nusa Tengara Timur).Apabila memperhatikan jarak tempuh yang di alami oleh jamaah haji dari daerah layanan kedua bandara embarkasi tersebut (Hasanuddin,Juanda) memerlukan waktu dan biaya transportasi lokal yang tinggi. Untuk Bandara Juanda, jika daerah layanan diluar Provinsi Jawa timur yaitu Provinsi Bali, NTB dan NTT jamaah hajinya dijadikan satu kelompok akan dapat dikembangkan satu bandara embarkasi baru karena jumlahnya mencapai 5.070 jamaah sedikit dibawah persyaratan Departemen Agama (7.000). jumlah tersebut (5.070 jamah) masih lebih besar apabila dibandingkan dengan Bandara embarkasi Sepinggan (4.530 jamah),Bandara Syamsuddin Noor (4.462 jamaah) dan Bandara Iskandar Muda (3.558 jamaah). Kondisi ini memungkinkan pengembangan bandara embarkasi haji baru di Kab.Lombok Tengah segera terwujud yang pembangunannya saat ini pekerjaan fisik landasan apron sudah mencapai 30 % (cukup signifikan) setelah mendapat investor dari Timur Tengah, Emaar Properties LLC, sebuah badan usaha milik Negara (BUMN) terbesar di Timur Tengah (Antara Bisnis Indonesia, 13 Oktober 2008). Kemungkinan lain adalah melihat jamaah haji Provinsi Jawa Barat yang merupakan jumlah jamaah haji terbanyak untuk Bandara embarkasi haji Soekarno-Hatta yaitu sebanyak 37.227 jamaah (63% dari jumlah jamaah haji yang berangkat dari Bandara embarkasi Soekarno-Hatta). Sedangkan di Provinsi Jawa Barat ada rencana pembangunan bandara baru pengganti Bandara Husein Sastranegara yang tidak bisa dikembangkan lagi yaitu di daerah Majalengka dimana lokasinya tidak jauh dengan daerah pelayanannya disekitar Jawa Barat. Hal ini menjadikan Bandara Majalengka merupakan tambahan lagi bandara embarkasi haji baru yang akan melayani jamaah haji Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya bandara baru tersebut ditambah dengan Bandara Kualanamu (Sumatera Utara) pengganti Bandara Polonia, maka selayaknya bandara-bandara tersebut langsung disiapkan untuk bandara embarkasi haji dengan segala fasilitas yang diperlukan untuk mengantisipasi kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang akan menetapkan hanya tipe pesawat berbadan lebar (*wide body*) B-747 yang dapat digunakan untuk mengangkut jamaah haji dengan kapasitas lebih dari 400 tempat duduk.

Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus segera memperhatikan beberapa bandara embarkasi seperti Iskandar Muda, Minangkabau Internasional Airport, SM. Badaruddin II, Adi Sumarmo, Sepinggan dan Syamsuddin Noor untuk dikembangkan agar dapat didarati oleh pesawat sejenis B-747 yang mempunyai kapasitas > 400 tempat duduk tersebut.

C. Otonomi Daerah

Sejalan dengan pergeseran waktu ternyata Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi, sehingga dikeluarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menekankan azas otonomi yang diperluas. Azas otonomi daerah membawa konsekuensi pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian dibutuhkan kesiapan sumber daya dan dana yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal perencanaan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi, daerah dapat membuatnya sendiri sesuai dengan pola perkembangan wilayah yang ingin dicapai dan strategi pengembangan ekonomi setempat, sehingga hal ini merupakan tantangan baru bagi Pemerintah Daerah untuk lebih matang menyiapkan infrastruktur yang menjadi kewenangan daerahnya.

Sebelum era otonomi daerah,hampir semua kebijakan pengembangan/pembangunan dilakukan secara terpusat, dimana hampir semua kebijakan dan strategi diproses, dirumuskan dan ditentukan di pusat. Maka pada era otonomi dewasa ini aspirasi dan visi daerah dalam pengembangan jaringan transportasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan aturan yang tertuang di dalam KM No.22 Tahun 2004 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, bahwa pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi kabupaten/kota dapat bertindak sebagai penyelenggara bandara umum dan bandara khusus (Pasal 11). Bahkan melalui kebijakan Menteri Perhubungan dengan KM No. 45 tentang Penyerahan Penyelenggaraan Bandar Udara Umum. Pemerintah menyerahkan 142 bandara umum dan UPT kepada Pemda di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan pelayanan jamaah haji, masing-masing Pemerintah Daerah berkeinginan untuk keberangkatan jamaah haji dilakukan di daerahnya melalui bandara .embarkasinya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dituntut partisipasinya untuk membangun infrastruktur seperti pengasramaan sebagai tempat penampungan bagi jamaah haji yang dapat menampung sebanyak 7.000 jamaah sebagaimana yang di persyaratkan oleh Pemerintah. Demikian pula untuk pengembangan bandaranya dengan menyediakan lahan untuk pengembangan/pembangunan bandara baru seperti yang dilakukan oleh Pemda NTB untuk bandara di Lombok Tengah dan Pemda Jawa Barat untuk Bandara Majalengka sehingga terjadi penyebaran di dalam pelayanan jamaah haji Saat ini terjadi penumpukan jamaah haji di Bandara Soekarno-Hatta dan Juanda.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yaitu :

1. Jumlah jamaah haji Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara waiting list (menunggu giliran) karena jumlahnya tidak boleh melebihi kuota / porsi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi yaitu 205.000 jamaah
2. Dari 11 (sebelas) bandara embarkasi yang ada terdapat bandara embarkasi yang memberangkatkan jamaah hajinya dibawah persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu (7.000 jamaah) seperti Bandara Iskandar Muda (3.558), Bandara Sepinggan (4.530), Bandara Syamsuddin Noor (4.462).

3. Masih ada embarkasi yang belum dapat di darati oleh pesawat terbang wide body sejenis B-747 yaitu Bandara Iskandar Muda, Minangkabau Internasional Airport, SM. Badaruddin II, Adi Sumarmo,. Sepinggan, dan Syamsuddin Noor, sedangkan Pemerintah Arab Saudi sudah memberi isyarat untuk memberlakukan penggunaan pesawat terbang wide body sejenis B-747

B. Saran

1. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah haji Indonesia, bandara baru di Lombok Tengah selayaknya dipersiapkan menjadi bandara embarkasi haji untuk melayani daerah Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Baru yang selama ini harus bergabung dengan embarkasi Surabaya
2. Untuk mengurangi kejenuhan di Bandara Soekarno-Hatta, rencana pembangunan bandara baru di Majalengka segera di realisasikan untuk melayani jamaah haji daerah Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya 63 % dari jamaah haji yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta.
3. Apabila Pemerintah Arab Saudi jadi mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan pesawat terbang untuk mengangkut jamaah haji adalah pesawat berbadan lebar (wide Body / B-747), Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan bandara embarkasi haji yang mampu di darati oleh jenis pesawat terbang berbadan lebar dengan kapasitas > 400 tempat duduk, atau menetapkan dengan prioritas bandara yang saat ini mampu di darati oleh pasawat terbang dengan kapasitas > 400 tempat duduk dan mampu memberangkatkan jamaah haji sebanyak 7000 Jamaah

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daearah
2. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 44 Tahun 2002 Tentang Tatanan Kebandarudaraan
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 383 Tahun 2004 – KM. No. 67 Tahun 2004 Tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji
4. Keputusan Menteri Agama Nomor. 31 Tahun 2007 Tentang Penetapan Porsi Jamaah Haji Indonesia Tahun 1428 H / 2007 M
5. Harian Bisnis Indonesia, 13 Oktober 2008
6. Harian Suara Karya, 15 Oktober 2008

*) M.N. Nurrasjid, lahir di Jakarta 10 Nopember 1948, Sarjana Administrasi Niaga, Peneliti Madya Transportasi Udara di Badan Litbang Perhubungan